

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Retribusi

Menurut Syahadat, Y. A., & Ramadhan, D. (2022). Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dipungut karena adanya pelayanan atau fasilitas yang diberikan secara langsung kepada masyarakat sehingga berbeda dengan pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, retribusi daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, retribusi memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan fasilitas umum secara berkelanjutan. Retribusi daerah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Menurut Sari dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi positif terhadap PAD, meskipun efektivitas pemungutannya masih perlu ditingkatkan melalui digitalisasi sistem.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa pelayanan atau pemberian izin tertentu yang

disediakan bagi masyarakat maupun badan usaha. Retribusi menjadi salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena berperan dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta peningkatan mutu pelayanan publik. Berbeda dengan pajak, retribusi memberikan manfaat atau balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung oleh pihak yang memanfaatkan fasilitas atau layanan yang disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan retribusi yang dilakukan secara efektif, akuntabel, dan didukung oleh penerapan teknologi informasi akan mampu meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

2.1.2 Fungsi Retribusi

Retribusi memiliki beberapa fungsi penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Fungsi utama retribusi adalah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui penerimaan retribusi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas fasilitas umum, memperbaiki pelayanan publik, serta mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, retribusi juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial karena dapat mengatur penggunaan fasilitas umum agar lebih tertib dan sesuai aturan. Retribusi juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan publik sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, dan efisien.

2.1.3 Manfaat Retribusi

Manfaat retribusi dapat dirasakan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi pemerintah daerah, retribusi menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, bagi masyarakat, retribusi memberikan manfaat berupa tersedianya fasilitas umum yang lebih tertata, aman, nyaman, dan terpelihara. Selain itu, pengelolaan retribusi yang baik juga dapat meningkatkan transparansi serta efektivitas pelayanan publik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Adanya retribusi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, membantu pembiayaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan pengelolaan fasilitas umum yang lebih tertib dan efektif. pengelolaan retribusi memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Sari dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi positif terhadap PAD, meskipun efektivitas pemungutannya masih perlu ditingkatkan melalui digitalisasi sistem. Menurut Pratama (2020) mengenai retribusi parkir menunjukkan bahwa pengelolaan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan kurang optimalnya penerimaan daerah dan berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan. Selain itu, sedangkan menurut Hidayat dan Putri (2022) menjelaskan bahwa penerapan sistem e-retribusi mampu meningkatkan transparansi, akurasi data, dan pengawasan terhadap penerimaan daerah.

2.1.4 Retribusi Parkir

Menurut Mailoa et al., 2023) parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Parkir juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan produktivitas lingkungan dan manusia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah retribusi parkir yaitu menyelenggarakan pelayanan parkir tepi jalan umum sesuai dengan arahan pemerintah dan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011: 15), Objek retribusi umum adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Dengan adanya retribusi parkir, pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas parkir agar tetap tertib, aman, dan nyaman digunakan oleh masyarakat. Berikut beberapa pembahasan retribusi Parkir yaitu sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Parkir

Penyelenggaraan retribusi parkir memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, menurut Mardiasmo (2011), objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh orang pribadi maupun badan.

2. Jenis- Jenis Retribusi

Retribusi parkir dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan lokasi pelayanan. Jenis pertama adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu pungutan atas penggunaan ruang parkir yang berada di sepanjang jalan umum yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jenis kedua adalah retribusi tempat khusus parkir, yaitu pungutan atas penggunaan fasilitas parkir yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah, seperti gedung parkir, terminal, pelataran parkir, maupun lokasi parkir khusus lainnya yang dikelola secara resmi.

3. Fungsi Retribusi Parkir

Retribusi parkir memiliki fungsi yang penting bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Dari sisi pemerintah, retribusi parkir menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan berbagai layanan publik. Dari sisi pelayanan, retribusi parkir berfungsi mendukung pengelolaan fasilitas parkir agar lebih tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, pengaturan parkir yang baik juga berperan dalam menjaga kelancaran lalu lintas sehingga dapat mengurangi kemacetan di kawasan yang memiliki tingkat aktivitas kendaraan tinggi.

4. Pemanfaatan Teknologi dalam Retribusi Parkir

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem digital dalam pengelolaan retribusi parkir. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan e-retribusi dan dashboard

monitoring berbasis *Business Intelligence*, yang memungkinkan proses pencatatan, pengawasan, serta pelaporan penerimaan retribusi dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan real-time. Pemanfaatan teknologi tersebut juga meningkatkan transparansi pengelolaan data serta membantu pimpinan dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan secara lebih efektif.

5. Peran Retribusi Parkir dalam Pelayanan Publik

Retribusi parkir memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang transportasi. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur parkir, memperbaiki sistem pengelolaan, serta mengembangkan layanan berbasis teknologi. Selain memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi parkir juga mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih tertib, efisien, transparan, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas parkir yang disediakan pemerintah daerah.

2.1.5 Sistem E Retribusi Parkir

E-retribusi parkir adalah sistem pemungutan retribusi parkir yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi digital, sistem berbasis web, atau pembayaran non-tunai. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan metode manual dalam pencatatan dan pelaporan retribusi parkir sehingga lebih efektif, transparan, dan

akuntabel. Dalam implementasinya, e-retribusi parkir memungkinkan petugas parkir dan dinas terkait untuk mencatat transaksi secara real-time, sehingga data penerimaan retribusi dapat langsung dipantau oleh pemerintah daerah. Sistem ini juga mengurangi risiko kesalahan pencatatan, kebocoran pendapatan, serta praktik pungutan liar yang sering terjadi pada sistem manual, (Sahanaya et al., 2025).

Dalam sistem e-retribusi, pembayaran parkir dapat dilakukan menggunakan kartu elektronik, aplikasi digital, Qris, maupun media pembayaran non-tunai lainnya. Data transaksi yang masuk akan langsung tersimpan dalam sistem dan dapat dipantau oleh instansi pengelola seperti Dinas Perhubungan Kota Tegal secara real-time. Penerapan sistem e-retribusi parkir bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan retribusi parkir, serta meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

2.1.6 Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) merupakan suatu konsep, sistem, dan teknologi yang digunakan untuk membantu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data menjadi informasi yang bermanfaat bagi suatu organisasi atau instansi. Business Intelligence digunakan agar data yang sebelumnya hanya berupa angka atau laporan biasa dapat diubah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya BI, organisasi dapat mengetahui kondisi, perkembangan, serta permasalahan yang terjadi berdasarkan data yang

dimiliki sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan efektif.

Business Intelligence memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi (BI)

Business Intelligence memiliki fungsi utama sebagai alat untuk membantu proses monitoring, analisis data, dan penyusunan laporan secara sistematis. BI mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, kemudian mengolahnya menjadi visualisasi seperti grafik, tabel, diagram, maupun dashboard interaktif. Dengan demikian, pengguna dapat memahami kondisi data secara lebih mudah tanpa harus melakukan analisis secara manual.

2. Manfaat Business Intelligence (BI)

Penerapan Business Intelligence memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, di antaranya meningkatkan efisiensi pengolahan data, mempercepat penyajian informasi, mempermudah analisis terhadap data dalam jumlah besar, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat. Selain itu, BI juga memungkinkan penyajian informasi secara real-time sehingga organisasi dapat melakukan evaluasi dan pengawasan secara lebih efektif.

3. Business Intelligence Menurut Penelitian Terdahulu

Menurut Rosyidi dan Nuraini (2023), Business Intelligence merupakan pendekatan yang berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui pemanfaatan data yang akurat. Sementara itu, Dian Setiawan dkk. (2025) menyatakan bahwa Business Intelligence mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu dashboard

sehingga proses analisis, pelaporan, dan penyampaian informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dipahami oleh pengguna.

4. Penerapan Business Intelligence dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam bidang pemerintahan, Business Intelligence dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan berbagai jenis data, termasuk data pelayanan publik, keuangan, dan retribusi daerah. Pada penelitian ini, BI diterapkan dalam pengelolaan data retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Tegal melalui penggunaan Microsoft Power BI. Pemanfaatan BI memungkinkan data retribusi parkir disajikan dalam bentuk dashboard interaktif sehingga proses monitoring pendapatan, evaluasi target, serta penyusunan laporan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien.

2.1.7 Power BI

Microsoft Power BI merupakan aplikasi Business Intelligence (BI) yang dikembangkan oleh microsoft untuk membantu proses pengolahan, analisis, dan visualisasi data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Power BI digunakan untuk mengubah data yang awalnya berbentuk tabel atau angka menjadi tampilan visual seperti grafik, diagram, peta, dan dashboard interaktif. Dengan adanya visualisasi tersebut, pengguna dapat lebih mudah memahami kondisi data, memantau perkembangan informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Power BI juga memiliki kemampuan untuk menghubungkan data dari berbagai sumber, seperti Microsoft Excel, database, website, maupun sistem informasi lainnya sehingga proses pengolahan data menjadi lebih terintegrasi dan efisien.

Power BI memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat pengolahan data, visualisasi data, monitoring informasi, serta pembuatan laporan interaktif. Dalam penggunaannya, Power BI mampu membantu instansi atau perusahaan untuk melihat perkembangan data secara real-time sehingga proses evaluasi dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, fitur filter dan interaktivitas pada dashboard memungkinkan pengguna menampilkan informasi sesuai kebutuhan, seperti berdasarkan periode waktu, wilayah tertentu, maupun kategori data tertentu. Oleh karena itu, Power BI banyak digunakan pada bidang pemerintahan, pendidikan, bisnis, keuangan, maupun transportasi untuk membantu pengelolaan data secara lebih modern dan efektif.

Menurut penelitian Damayanti Larasati dkk. (2024), manfaat utama penggunaan Power BI adalah membantu proses analisis data menjadi lebih cepat, akurat, dan interaktif. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dashboard berbasis Business Intelligence dapat mempermudah instansi dalam melakukan monitoring data serta mendukung pengambilan keputusan karena seluruh informasi ditampilkan secara visual dalam satu tampilan dashboard. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa penggunaan Power BI mampu meningkatkan efektivitas pelaporan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dibandingkan sistem manual.

Menurut penelitian Steven Owen Purnawan dkk. (2023) menyatakan bahwa sistem dashboard berbasis Power BI memiliki fungsi untuk membantu pengelolaan data secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Melalui dashboard tersebut, pengguna dapat memantau data pendapatan, transaksi, maupun

laporan lainnya secara real-time sehingga proses pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dashboard mampu mengurangi kesalahan pencatatan data karena proses pengolahan informasi dilakukan secara digital.

Berdasarkan dari beberapa penelitian, bahwa Power BI memiliki fungsi utama sebagai alat pengolahan, analisis, dan visualisasi data yang membantu proses monitoring serta pengambilan keputusan. Adapun manfaat penggunaan Power BI yaitu meningkatkan efektivitas pelaporan, mempermudah analisis data, mempercepat penyajian informasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta membantu instansi dalam mengelola data secara lebih modern, transparan, dan efisien. Dalam penelitian mengenai retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Tegal, penggunaan Power BI diharapkan mampu membantu proses monitoring pendapatan parkir dan penyajian laporan secara lebih informatif

2.1.8 Dashboard

Dashboard merupakan suatu tampilan visual yang digunakan untuk menyajikan informasi penting secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami dalam satu layar. Dashboard biasanya menampilkan data dalam bentuk grafik, tabel, diagram, maupun indikator tertentu sehingga pengguna dapat melihat kondisi dan perkembangan data dengan lebih cepat. Secara umum, dashboard digunakan sebagai alat bantu untuk monitoring, pengawasan, analisis data, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan adanya dashboard, data yang sebelumnya hanya berupa angka atau laporan panjang dapat diubah

menjadi informasi visual yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh pengguna.

Dalam perkembangannya, dashboard banyak digunakan pada berbagai bidang, seperti pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Dashboard membantu pengguna dalam memantau data secara real-time sehingga proses evaluasi dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selain itu, dashboard juga memiliki fitur interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan filter data berdasarkan kebutuhan tertentu, seperti periode waktu, wilayah, maupun kategori data lainnya. Oleh karena itu, dashboard menjadi salah satu media yang efektif untuk membantu penyajian informasi dan pengelolaan data dalam jumlah besar. Menurut Eckerson (2011) menjelaskan bahwa dashboard adalah alat manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur, memonitor, dan mengelola aktivitas organisasi melalui penyajian data secara visual. Dashboard memungkinkan pengguna melihat indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI), mengetahui perubahan kondisi berdasarkan data yang tersedia, serta melakukan analisis terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai alat pendukung dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data. (Eckerson, 2011)

Menurut Damayanti Larasati dkk. (2024), dashboard berbasis Business Intelligence mampu membantu proses monitoring dan analisis data secara lebih cepat, akurat, dan interaktif. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dashboard

dapat mempermudah instansi dalam memahami informasi karena data disajikan dalam bentuk visual yang lebih sederhana dan mudah dibaca. Dashboard juga membantu meningkatkan efektivitas pelaporan serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Damayanti Larasati, Nanny Dewi Tanzil, Adhi Alfian, Lindawati Wardani	2024	Business Intelligence Dashboard for financial performance Analysis of public service agency using Microsoft Power BI	Deskriptif	Penelitian menunjukkan bahwa dashboard berbasis Business Intelligence menggunakan Microsoft Power BI mampu membantu analisis kinerja keuangan secara lebih cepat, akurat, dan interaktif sehingga mempermudah proses monitoring dan pengambilan keputusan pada instansi pelayanan publik.
2	Ardath Prahara Setyan dan I Putu Agus Eka Pratama	2023	Power Business Intelligence Dashboard visualization of losses number of motor	Business Intelligence dan Visualisasi Dashboard	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dashboard Power BI mampu membantu proses visualisasi data kendaraan bermotor secara efektif sehingga

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			vehicle in east java, indonesia		mempermudah pihak instansi dalam melakukan monitoring data dan pengambilan keputusan.
3	Steven Owen Purnawan, Yulian Findawati, Nuril Lutvi Azizah	2023	Sistem Manajemen Retribusi Parkir berbasis web pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	Kuantitatif	Penelitian menyimpulkan bahwa sistem retribusi parkir berbasis web mampu meningkatkan efektivitas pendataan, pelaporan, dan pengelolaan retribusi parkir sehingga proses monitoring menjadi lebih terstruktur dan efisien.
4	Ihsan Haryansyah, Heri Priyanto, Yus Sholva	2024	Sistem Informasi Parkir Berbasis Geospasial untuk monitoring potensi dan pendapatan retribusi dan pajak Parkir di kota pontianak	Metode Waterfall	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis geospasial dapat membantu monitoring potensi pendapatan retribusi parkir dan pajak parkir secara lebih optimal sehingga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5	Linda Oktaviani, Himawan Sutanto, Ali Akbar Hidayat	2024	Analisis Perbandingan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat	Deskriptif Kuantitatif	Penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir dan retribusi parkir memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD, namun efektivitas pengelolaan data dan pengawasan masih perlu ditingkatkan agar penerimaan daerah lebih optimal.

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Usivianti Latifah Humairah, Endah Dwi Kusumastuti, Iyeh Supriatna	2022	Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kantor Badan pendapatan daerah Kota Palembang	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir masih belum optimal karena terdapat kendala dalam pengawasan dan pelaksanaan di lapangan sehingga diperlukan sistem monitoring yang lebih baik.
7	Erni Prasetyani dan Anita Kusuma Atmaja	2024	Analisis Pengawasan Sistem Retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dan transportasi DKI Jakarta	Kualitatif	Penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan retribusi parkir masih menghadapi berbagai kendala, seperti pungutan liar dan kurang optimalnya monitoring, sehingga diperlukan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, (2026).